

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi adalah suatu lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi, yakni program pendidikan lanjutan dari pendidikan menengah pada jalur pendidikan formal. Program pendidikan tinggi ini secara formal dapat dipandang sebagai program pendidikan "final" yang dapat ditempuh oleh seseorang.

Program pendidikan tinggi mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945) dan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia (sebagaimana yang diprioritaskan oleh GBHN 1993). Hal tersebut tercermin dalam rumusan tujuan pendidikan tinggi (PP No. 30 Tahun 1990) sebagai berikut:

1. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Untuk mencapai tujuan di atas, setiap perguruan tinggi perlu menyiapkan dan merealisasikan suatu program

pendidikan tinggi yang bersifat menyeluruh, dalam arti yang mendorong dan memungkinkan bagi bertumbuhkembangnya segenap aspek kepribadian individu mahasiswa ke arah kedewasaan sebagaimana yang diharapkan. Suatu program pendidikan tinggi yang baru hanya menekankan pengembangan segi intelektual mahasiswa tentunya belum memenuhi harapan tadi. Berkenaan dengan perihal ini, Moh. Surya (1993: 3) mengemukakan suatu pernyataan sebagai berikut:

Kegiatan pendidikan tidak hanya mengembangkan segi intelektual saja, melainkan harus mampu mengembangkan segi-segi lainnya seperti sosial, moral, pribadi, fisik, dan profesional. Untuk mewujudkan hal itu, jelas pendekatan instruksional saja belum menjamin tercapainya keberhasilan tadi. Kegiatan belajar mengajar sebagaimana dilaksanakan sekarang ini baru lebih mengarah sasarannya kepada perkembangan segi intelektual dan kurang mampu menjangkau segi-segi kepribadian lainnya. Oleh karena itu jelas dirasakan perlu adanya pendekatan lain yang lebih mengarah sasarannya kepada segi-segi kepribadian mahasiswa. Layanan inilah yang kita kenal dengan bimbingan dan konseling.

Dalam kutipan di atas, tersurat suatu pernyataan yang menekankan perlunya penyelenggaraan program bimbingan dan konseling dalam aktivitas pendidikan di perguruan tinggi. Program bimbingan dipandang sebagai salah satu aktivitas yang dipandang perlu guna mewujudkan program pendidikan tinggi yang menyeluruh sesuai dengan aspek-aspek perkembangan individu mahasiswa.

Kalau kita telaah PP No 30/1990. tidak ditemukan satu pasal dan/atau satu ayat pun yang secara khusus mewajibkan diselenggarakannya program bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Namun hal tersebut tidak

berarti keliru atau menyimpang kalau suatu perguruan tinggi menyelenggarakan suatu program bimbingan dan konseling, sebab kalau PP No. 30/1990 tersebut ditelaah secara cermat lagi, bahkan ditemukan beberapa ayat yang membuka peluang bahkan "mengundang" bagi diselenggarakannya program bimbingan dan konseling di perguruan tinggi (pasal 27 ayat 7 dan pasal 106 ayat 1). Pada pasal 27 ayat 7 dinyatakan bahwa perguruan tinggi dapat menyediakan unsur lain (yang belum tercantum secara eksplisit pada pasal tersebut) yang dianggap perlu untuk menyelenggarakan pendidikan, sedangkan pada pasal 106 ayat 1 dinyatakan bahwa mahasiswa berhak untuk mendapatkan layanan bimbingan dari dosen.

Sekurang-kurangnya ada tiga alasan utama yang turut mendukung perlunya layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi. Tiga alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama adalah alasan secara psikologis (dilihat dari segi individu mahasiswa). Para mahasiswa lazimnya adalah individu yang sedang berada pada fase perkembangan remaja akhir atau dewasa awal. Periode ini merupakan masa transisi dari masa remaja ke masa dewasa. Pada masa transisi, lazimnya ini cukup potensial untuk dialaminya berbagai persoalan hidup oleh individu yang bersangkutan, seperti masalah studi, pekerjaan, pribadi, hubungan dengan teman (termasuk pacaran), pengaturan waktu, bisa dialami

pada periode ini, terlebih-lebih pada masa peralihan memasuki fase kehidupan dewasa. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono (1993), masalah-masalah non akademik yang sering dialami mahasiswa adalah berkenaan dengan masalah hubungan dengan orang tua, pembauran peran dalam masyarakat, pencarian identitas diri, cinta dan pacaran, kesulitan ekonomi, membagi waktu (antara hobi, minat dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan belajar).

Kedua dilihat dari tuntutan studi di perguruan tinggi. Perguruan tinggi bukan sekedar merupakan kelanjutan studi dari SLTA yang tidak memiliki perbedaan-perbedaan tertentu. Penerapan sistem SKS di perguruan tinggi dengan segenap tuntutan akademisnya memberikan suatu tantangan dan kerumitan tersendiri bagi mahasiswa. Dengan kata lain, terdapat perbedaan cukup signifikan antara pola pendidikan di Perguruan Tinggi dengan pola pendidikan pada jenjang-jenjang pendidikan sebelumnya. Menurut Winarno Surakhmad (1980), perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tiga hal berikut: (1) sasaran pendidikan di perguruan tinggi biasanya diarahkan untuk mendidik ahli-ahli dalam suatu spesialisasi tertentu dengan bahan-bahan kajian teoritis dan praktis seluas dan setinggi mungkin; (2) strategi belajar di perguruan tinggi sebagian besar (bahkan hampir sepenuhnya) dipercayakan kepada mahasiswa, sedangkan peran dosen lebih terbatas pada memberikan bimbingan dan menyampaikan dasar-dasar pengetahuan;

(3) mahasiswa lebih banyak dituntut untuk berjiwa bebas, terbuka, dan berpikiran kritis. Adanya perbedaan-perbedaan tersebut menuntut pihak mahasiswa untuk melakukan upaya-upaya penyesuaian diri agar yang bersangkutan dapat menjalani program pendidikan tinggi dengan berhasil. Namun dalam kenyataannya, tidak semua mahasiswa dapat memenuhi tuntutan tersebut secara mulus, sehingga pada gilirannya mendorong diselenggarakannya suatu layanan tertentu (bimbingan) untuk membantu mahasiswa dalam melakukan penyesuaian dengan kondisi dan tuntutan kehidupan studi di perguruan tinggi.

Ketiga masih rendahnya produktivitas dan mutu lulusan perguruan tinggi serta masih ditemukannya mahasiswa putus kuliah. Hal tersebut dinyatakan dalam pokok-pokok pikiran tentang Pengembangan Pelayanan Bimbingan dan Konseling untuk Mahasiswa (Ditjen Dikti, 1984: 10).

Menyadari akan perlunya layanan bimbingan bagi mahasiswa, pemerintah dalam hal ini (Ditjen Dikti Depdikbud) melakukan upaya-upaya untuk menyiapkan dan/atau mengintensifkan pelaksanaan layanan bimbingan di perguruan tinggi. Salah satu upaya yang cukup menonjol pada waktu itu adalah dilakukannya penataran-penataran tingkat nasional mengenai bimbingan di perguruan tinggi. Tepatnya penataran-penataran tersebut diselenggarakan di tiga perguruan tinggi (UI, UNPAD, dan UGM) pada tahun 1980-1983). Jumlah lulusan penataran yang dihasilkan selama periode tersebut mencapai

459 orang dosen yang berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta. Setelah selesai kegiatan penataran, pada tahun 1984 dibentuk suatu tim khusus yang ditugaskan untuk memantau sekaligus mendapatkan umpan balik tentang pelaksanaan bimbingan di perguruan tinggi tempat para lulusan penataran bekerja.

Begitupun perguruan-perguruan tinggi, sejak kira-kira akhir tahun 1970-an atau awal tahun 1980-an beberapa perguruan tinggi di Indonesia (seperti UNPAD, IPB, IKIP Malang, IKIP Bandung, IKIP Surabaya, Universitas Kristen Satya Wacana, UNPAS Bandung) telah merintis penyelenggaraan layanan bimbingan ini. Universitas Kristen Satya Wacana bahkan telah mulai merintisnya sejak tahun 1967. Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan layanan bimbingan dan konseling tersebut berdasarkan persepsi dan pemahaman para penyelenggaranya disesuaikan dengan situasi dan kondisi perguruan tinggi setempat.

Namun sayangnya proses pengembangan layanan bimbingan dan konseling di perguruan tinggi itu tidak selalu mulus, bahkan beberapa diantaranya ada yang tidak mengalami kemajuan yang berarti. Sarlito Wirawan Sarwono (1993), berdasarkan pengalamannya menyatakan bahwa:

... lembaga-lembaga bimbingan dan konseling ini tidak berfungsi dengan cukup optimal di masing-masing perguruan tinggi. Banyak ruang bimbingan dan konseling yang di sediakan oleh pimpinan perguruan tinggi kosong karena tidak ada yang mengunjungi. Sementara mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah merasa lebih suka mencari penyelesaian sendiri di luar.

Tampaknya ada beberapa kendala dalam penyelenggaraan bimbingan di perguruan tinggi yang sampai saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Dalam hal ini, Sarlito Wirawan Sarwono (1993) mengidentifikasi tiga kendala, yakni: (1) adanya kecenderungan mahasiswa tidak menggantungkan diri kepada orang lain, sehingga jika mengalami masalah mereka cenderung memecahkannya sendiri terlebih dahulu; (2) kurangnya tenaga bimbingan dan konseling yang tersedia di perguruan tinggi (tenaga-tenaga bimbingan dan konseling umumnya juga merangkap dosen biasa yang sudah dibebani dengan berbagai tugas rutin); (3) prosedur birokrasi yang berbelit-belit untuk merealisasikan suatu program dan kurangnya anggaran dana. Sementara itu, Sri Rahayu Partosuwido (1993) mengemukakan pengalamannya dalam menyelenggarakan bimbingan di UGM dengan menyatakan bahwa dua kendala utama yang menghambat suksesnya penyelenggaraan bimbingan adalah kurangnya dana yang tersedia dan unsur personal (para personalnya sudah senior dan bertugas rangkap). Pendeknya, masih banyak kendala-kendala yang perlu ditelaah secara cermat guna lebih mengembangkan penyelenggaraan bimbingan di perguruan tinggi. Penelaahan yang dimaksud bukan penelaahan yang didasarkan pada kesan atau judgement semata, melainkan merupakan suatu penelaahan yang didasarkan pada kerja penelitian. Sehingga kesimpulan yang diperoleh benar-benar dapat dijadikan masukan yang berarti bagi pengembangan program bimbingan di perguruan tinggi.

Universitas Pasundan (UNPAS) Bandung sebagai salah satu perguruan tinggi yang telah dan sedang merintis upaya penyelenggaraan bimbingan, juga tidak terkecualikan dari kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan layanan bimbingan ini. Beberapa upaya untuk mengembangkan layanan dan menghidupkan lembaga bimbingan (seperti mengadakan ceramah umum tentang prospek bimbingan di perguruan tinggi bagi para pembina kemahasiswaan dan dosen wali, mengadakan ceramah umum tentang bimbingan dan tatakrama sunda bagi mahasiswa, mengadakan penataran tentang bimbingan bagi para pembina dan dosen wali telah dilakukan oleh pihak universitas. Program kegiatan bimbingan juga telah disusun, termasuk rencana anggaran biaya, sesuai dengan batas-batas kemampuan universitas yang ada. Namun demikian, boleh dikatakan bahwa sampai saat sekarang lembaga bimbingan dan konseling ini belum mampu menampilkan diri sebagaimana yang diharapkan. Dengan kata lain, masih banyak layanan bimbingan yang belum terealisasikan. Kegiatan bimbingan belum terlihat sebagai suatu pelayanan yang berkesinambungan kepada mahasiswa, melainkan baru lebih terlihat sebagai suatu kegiatan-kegiatan yang insidental.

Keadaan perkembangan bimbingan di UNPAS seperti yang dideskripsikan di atas memunculkan berbagai pertanyaan yang mendorong dilakukannya suatu penelaahan mendalam tentang bagaimana sebenarnya kesiapan UNPAS untuk menyelenggarakan program layanan bimbingan ini. Sementara di satu

sisi, beberapa upaya untuk mengembangkan layanan bimbingan telah dilakukan, tapi di sisi lain, perkembangan layanan bimbingan di sana belum tampil seperti yang diharapkan.

B. Rumusan Masalah

Secara formal lembaga unit bimbingan dan konseling di UNPAS mulai dibentuk pada tahun 1990 melalui SK Rektor Nomor: 042/UNPAS.R/SK/Q/VIII/1990. Untuk memfungsikan lembaga bimbingan dan konseling tersebut, pada tahun 1992 ditunjuklah sepuluh orang personal yang ditugaskan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan program bimbingan pada lima fakultas yang ada di UNPAS (untuk setiap fakultas masing-masing dua orang personal). Sejak tahun 1990-an itulah, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling mulai dirintis dan dikembangkan di UNPAS.

Kalau dilihat dari segi usia, perkembangan bimbingan di UNPAS boleh dikatakan masih sangat muda. Apalagi kalau dibandingkan dengan perkembangan bimbingan pada beberapa perguruan tinggi lain yang telah merintisnya sejak tahun 1970-an, bahkan ada yang sejak tahun 1960-an. Namun bagi yang berorientasi kepada kemajuan, mudanya usia ini bukan merupakan alasan yang tepat untuk menjelaskan mengapa layanan bimbingan di UNPAS belum terselenggara sebagaimana yang diharapkan. Penelaahan untuk mendapatkan jawaban itu lebih tepat kalau diarahkan kepada segi kesiapan UNPAS untuk menyelenggarakan layanan bimbingan. Secara lebih

spesifik, penelaahan ini perlu diarahkan kepada kesiapan setiap unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling tersebut.

Arah penelaahan penelitian di atas didasarkan pada pemikiran bahwa terselenggara tidaknya suatu program bimbingan pada lembaga sangat tergantung kepada kesiapan lembaga yang bersangkutan untuk menyelenggarakan program bimbingan tersebut. Begitupun, sejauhmana kesiapan tersebut telah dimiliki akan sangat berkaitan erat dengan unsur-unsur yang terlibat dalam proses penyelenggaraannya.

Berdasarkan pengalaman mereka, Peters dan Shertzer (1974: 124) mengemukakan tiga faktor yang kritis dalam mengawali dan mengembangkan suatu program bimbingan. Tiga faktor yang dimaksud adalah: (1) kesesuaian program bimbingan dengan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa; (2) kesadaran staf pengajar akan pentingnya layanan bimbingan; (3) penggunaan pendekatan tim. Selanjutnya mereka mengemukakan beberapa petunjuk untuk mengawali pengembangan program layanan bimbingan yang baik, yakni dengan menekankan pentingnya unsur-unsur berikut: (1) penerimaan staf terhadap bimbingan; (2) artikulasi data mahasiswa pada sekolah-sekolah sebelumnya; (3) kebutuhan-kebutuhan mahasiswa; (4) kejelasan dari tujuan program bimbingan; (5) koordinasi fungsi; (6) kepemimpinan dan personal profesional; (7) penyediaan waktu; (8) upaya peningkatan kemampuan staf; (9) penggunaan sumber-sumber yang ada di

masyarakat; (10) evaluasi program yang terpelihara pelaksanaannya.

// Kalau pandangan Peters dan Shetzer tersebut dikembalikan kepada komponen-komponen pokok yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu program, maka sekurang-kurangnya teridentifikasi lima unsur penting dalam penyelenggaraan bimbingan, yakni: (1) personel yang terlibat dalam bimbingan (pimpinan, tenaga bimbingan yang inti, dosen, staf administrasi dan mahasiswa); (2) program bimbingan (tujuan berikut rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaannya); (3) sistem koordinasi dan mekanisme kerja; (4) anggaran; serta (5) fasilitas fisik yang tersedia.

Dengan kerangka pemikiran seperti diuraikan di atas, maka permasalahan pokok yang dijadikan fokus penelaahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan berikut: "Bagaimanakah kesiapan UNPAS dalam penyelenggaraan program bimbingan bagi mahasiswa?". Masalah pokok tersebut selanjutnya dirinci sebagai berikut:

1. Sampai di manakah kesiapan para personel UNPAS (unsur pimpinan, petugas pelaksana bimbingan, dosen, staf administrasi, dan mahasiswa) untuk menyelenggarakan program bimbingan? Untuk menelaah kesiapan personal ini, akan dipertimbangkan dari segi kualifikasi pendidikan, persepsi tentang kesadaran perlunya layanan bimbingan di perguruan tinggi, upaya-upaya yang dilakukan berkenaan dengan perealisasi program bimbingan, serta proporsi jumlah dan beban kerja mereka. Berdasarkan pada unsur-unsur tersebut,

maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul berkenaan dengan personil bimbingan ini adalah: (a) apa yang mereka peroleh mengenai pengalaman pendidikan dalam bimbingan?; (b) apa persepsi mereka tentang bimbingan?; (c) upaya-upaya apa yang mereka lakukan berkenaan dengan perealisasi program bimbingan?; dan (d) berapa banyak jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan ini. Khusus berkenaan dengan mahasiswa yang akan menjadi obyek telaahan adalah unsur kebutuhan mereka akan bimbingan, persepsi mereka tentang bimbingan dan kesadaran mereka untuk memanfaatkannya.

2. Bagaimanakah gambaran program bimbingan di UNPAS serta cara pengembangannya? Sampai di manakah relevansi antara tujuan dan isi kegiatannya dengan kebutuhan yang ada? Bagaimanakah prospek pengembangannya? Lalu, bagaimana pula cara penyelenggaraannya?

3. Bagaimana sistem koordinasi dan mekanisme kerja bimbingan selama ini berlangsung? Seberapa jauh sistem koordinasi dan mekanisme kerja itu mendukung bagi terse-lenggaranya program bimbingan secara efektif?

4. Berapa besar dana yang tersedia untuk keperluan penyelenggaraan bimbingan? Dalam hal ini akan dilihat kesesuaiannya dengan program yang disusun dan subyek garapan yang harus dilayani.

5. Apa yang telah dimiliki UNPAS berkenaan dengan fasilitas fisik dan administrasi bimbingan? Lalu fasilitas apa pula yang dipandang perlu, namun belum dimiliki?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, secara umum penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari pimpinan, pelaksana dan mahasiswa tentang perencanaan dan implementasi program Bimbingan Konseling di UNPAS. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi empirik tentang hal-hal berikut:

1. Kondisi kesiapan para personel UNPAS untuk melaksanakan fungsi atau peran bimbingan mereka.
2. Deskripsi program bimbingan yang dikembangkan di Universitas Pasundan.
3. Gambaran tentang sistem koordinasi dan mekanisme kerja bimbingan di UNPAS dalam kaitannya dengan kelancaran penyelenggaraan layanan bimbingan.
4. Anggaran yang tersedia untuk penyelenggaraan bimbingan dan penggunaannya.
5. Keadaan fasilitas fisik dan administrasi bimbingan yang tersedia di UNPAS.

Secara lebih jauh, penelitian ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu temuan yang dapat dijadikan masukan untuk perencanaan bimbingan yang lebih sesuai dengan kebutuhan nyata mahasiswa di UNPAS.

Temuan penelitian di atas dapat berguna baik bagi pengayaan aspek teoritis maupun praktek di lapangan. Berkenaan dengan pengembangan aspek pengetahuan teoritis, penelitian ini dapat menghasilkan suatu temuan pemikiran

atau konsep tentang bimbingan di perguruan tinggi yang mungkin dapat memperkaya dan atau lebih memperjelas konsep-konsep yang sudah ada. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pijakan untuk meningkatkan kesiapan UNPAS dalam menyelenggarakan bimbingan; apakah itu berkenaan dengan penataan dan penyiapan personel, penyusunan dan pengembangan program bimbingan, penataan mekanisme kerja, dan penataan segi-segi lainnya yang berkaitan dengan bimbingan. Dengan mempertimbangkan segi-segi kesamaan dan perbedaannya, bahkan secara lebih luas hasil penelitian ini dapat juga diambil manfaatnya oleh perguruan tinggi lain untuk kepentingan serupa.

D. Asumsi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berpijak pada beberapa pemikiran dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan tinggi mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.

2. Untuk dapat tercapainya tujuan pendidikan tinggi secara memadai dan menyeluruh, diperlukan suatu layanan pendidikan yang menyeluruh pula. Layanan pendidikan tinggi tidak sekedar melayani perkembangan aspek intelektual mahasiswa, melainkan mencakup pula layanan terhadap perkembangan aspek-aspek kepribadian mahasiswa lainnya.

3. Bimbingan merupakan suatu bagian terpadu dari layanan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi. Dalam UUSPN

No.2/1989 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Dalam kenyataan UUSPN tersebut tersuratkan secara jelas bahwa bimbingan sebagai salah satu upaya pendidikan, sejajar dengan upaya pengajaran dan/atau pelatihan. Begitu juga Sunaryo Kartadinata (1989: 3) mengungkapkan bahwa bimbingan dalam sistem pendidikan di Indonesia merupakan konsekuensi logis dari hakikat pendidikan sebagai tersurat dan tersirat dalam GBHN. Di sisi lain, Miller, *et al.* (1978: 14) menyatakan bahwa layanan bimbingan adalah untuk semua siswa dari semua usia.

4. Peran bimbingan dalam konteks pendidikan tinggi adalah membantu dalam memperlancar pencapaian tujuan pendidikan tinggi secara optimal melalui upaya pemahaman dan penempatan diri mahasiswa serta memperlakukannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan diri mahasiswa yang bersangkutan.

5. Untuk efektifnya penyelenggaraan bimbingan diperlukan suatu program yang terencana secara matang serta sarana dan prasarana yang memadai, termasuk personel yang profesional dan partisipasi dari semua pihak yang terkait. Peter dan Shertzer (1974: 105) menyatakan bahwa: "... the absence of planned organization usually leads to undesirable conditions". Sedangkan Gibson dan Mitchel (1981: 24)

memberikan pernyataan sebagai berikut: "trained guidance personnels are essential for ensuring competencies, leadership, and direction, (this does not imply that para-professionals cannot make worth while contributions)".

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian yang dilakukan ini merupakan suatu studi kasus, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menelaah suatu obyek secara menyeluruh dan mendalam. Dikatakan oleh Bogdan dan Biklen (1982: 58) bahwa studi kasus merupakan "... a detailed examination of one setting, or one single subject or one single expository of documents".

Yang menjadi obyek telaahan adalah kesiapan UNPAS untuk menyelenggarakan layanan bimbingan dalam lima unsur telaahan sebagaimana yang telah diungkapkan pada bagian terdahulu. Untuk mendapatkan informasi tentang lima unsur tersebut digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

F. Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UNPAS Bandung yang mencakup lima fakultas, yakni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial Politik, Fakultas Teknik.

Guna mendapatkan data yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan, dilibatkan enam sumber data, yakni unsur

pimpinan, petugas bimbingan, dosen, mahasiswa, staf administrasi, serta dokumen-dokumen penyelenggaraan bimbingan yang ada.

